

Respon Tentang Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (Studi Pada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo)

Mei Diana Murti Rahmasari, Rina Herlina Haryanti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: meidiana18@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas tentang implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Cara *snowball* digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan respon adaptif kompromistis dalam semua aspek implementasi Program JKN KIS. Respon analitis dan respon kritis juga ditunjukkan dalam beberapa aspek namun tidak semua. Respon yang tidak pernah dimunculkan dalam semua aspek implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo adalah respon skeptis dan respon reaktif konfrontatif.

Kata Kunci: Implementasi; JKN KIS; PBI; Respon

Abstract

This study aims to see the response shown by persons with disabilities regarding the implementation of the JKN KIS Program in Sukoharjo Regency. This research uses descriptive qualitative research with interview and documentation data collection techniques. The snowball method is used to determine informants in this study. The data analysis technique used in this research is Miles and Huberman's data analysis technique. The results of this study indicate that the majority of persons with disabilities in Sukoharjo District show a compromising adaptive response in all aspects of implementing the JKN-KIS Program. Analytical response and critical response are also shown in some aspects but not all. Responses that have never been raised in all aspects of the implementation of the JKN KIS Program in Sukoharjo Regency are skeptical responses and confrontational reactive responses.

Keywords: Implementation; JKN KIS; PBI; Response

Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan berdasarkan kesamaan hak mereka mengalami hambatan serta

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya (UU Nomor 8 Tahun 2016). Penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari sangat rentan terhadap diskriminasi yang terjadi pada dirinya. Penyandang disabilitas berhak untuk menuntut pemenuhan hak-hak yang dilanggar dan merugikan dirinya akibat keterbatasan fisik sebagaimana dalam kasus ini adalah tindakan diskriminasi. Pada dasarnya diskriminasi merupakan bagian dari tindakan yang melanggar hak asasi manusia (Yuliani, 2019). Maka dari itu, penyandang disabilitas membutuhkan payung hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Dalam menjalani kehidupan, kesehatan merupakan hal yang paling penting agar seseorang dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Maka dari itu, semua orang yang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Hal ini juga telah diatur dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (2) mengenai penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk halnya layak untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan khusus dan berbeda dari masyarakat non disabilitas. Lebih khususnya, berdasarkan hasil dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dalam web *ham.go.id*, telah disetujui beberapa poin mengenai kesehatan penyandang disabilitas. Inti dari poin-poin tersebut yaitu negara harus menjamin bahwa penyandang disabilitas bisa memperoleh program serta perawatan kesehatan secara gratis atau terjangkau.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah guna memastikan masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan adalah dengan adanya program jaminan kesehatan nasional. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini ditujukan untuk semua elemen masyarakat, termasuk juga penyandang disabilitas. Program ini bertujuan agar semua masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. JKN terbukti mampu menurunkan *Out of Pocket* (OOP) secara berarti serta memiliki kontribusi paling kecil dalam kejadian katastrofik dibandingkan asuransi kesehatan lain (Nugraheni dkk, 2019). Hal tersebut sangat membantu penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan kesehatan secara gratis dikarenakan kondisi kemiskinan yang dialami oleh mayoritas penyandang disabilitas (Cahyono, 2017). Pelaksanaan JKN di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun dalam pelaksanaan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS, masih terdapat beberapa masalah yang diketahui dari keluhan masyarakat. Umumnya masyarakat mengeluhkan mengenai proses registrasi yang rumit, pelayanan yang dinilai masih kurang memuaskan, ruang perawatan yang tidak sesuai dengan jenis iuran, dan masih banyak lagi (Putri&Murdi, 2019). Keluhan yang dirasakan masyarakat tersebut tentunya juga menjadi keluhan dari penyandang disabilitas dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, ditambah lagi dengan kondisi dari penyandang disabilitas yang terbatas dan seharusnya mendapatkan pelayanan khusus. Dilansir dari berita *online*, medcom.id, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa dalam pelayanan akses JKN BPJS masih ada banyak peraturan yang tidak ada. Ada banyak tindakan mal praktek yang masih menghantui anak-anak penyandang disabilitas yang berujung pada hilangnya nyawa anak tersebut. Hal ini menandakan bahwa hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia masih mengkhawatirkan. Terkait hal penyediaan pelayanan kesehatan secara gratis bagi penyandang disabilitas, Kabupaten Sukoharjo telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan gratis bagi penyandang disabilitas bernama Kartu Identitas Penyandang Disabilitas (KIPD) sebagai Jamkesda bagi penyandang disabilitas. Jamkesda ini dibiayai oleh pemerintah menggunakan APBD. Namun pada tahun 2019, jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas mulai dikonsentrasikan pada penggunaan JKN-KIS, sedangkan KIPD hanya digunakan sebagai kartu identitas bagi penyandang disabilitas saja.

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak pada tahun 2020. Selain itu, Kabupaten Sukoharjo masuk dalam salah satu kabupaten dari 10 kabupaten/kota di Indonesia yang masuk ke dalam Program Peduli Pilar Disabilitas yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals) di bidang kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang termarjinalkan. Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo, pengimplementasian Program JKN-KIS merupakan langkah yang tepat untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo guna menjamin kesehatan penyandang disabilitas yang pada awalnya menggunakan Jamkesda berupa KIPD. Implementasi merupakan hal paling krusial dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah publik. Pembuktian apakah pemerintah memiliki respon serta cara yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan masyarakatnya juga tercermin melalui implementasi kebijakan (Permatasari, 2020). Dengan adanya pengimplementasian program ini diharapkan akan muncul respon dari kelompok sasaran atau *target group* (Ponto dkk, 2016). Mengetahui respon dari kelompok sasaran itu penting untuk mengetahui apakah mereka mendukung atau menolak pengimplementasian suatu program atau kebijakan. Respon dari kelompok sasaran ini sangat penting untuk mengukur hasil kinerja dari suatu kebijakan atau program yang kemudian akan digunakan sebagai bahan evaluasi implementasi dari program tersebut. Hadirnya kebijakan publik juga didasari kebutuhan guna penyelesaian masalah yang ada di dalam masyarakat oleh pemerintah dan diorientasikan pada pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Ramdhani & Muhammad,

2017). Karena tujuan utama kebijakan untuk masyarakat, maka respon dari masyarakat terhadap kebijakan atau program yang diimplementasikan menjadi penting untuk mengukur apakah kebijakan atau program tersebut dapat memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat.

Implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo ini dilihat berdasarkan teori implementasi milik Charles O. Jones dalam Adriansyah dkk (2021) yang melihat implementasi dari tiga aspek, aspek tersebut adalah:

1. Organisasi, yaitu cara atau usaha yang dilakukan oleh organisasi pelaksana melaksanakan tugasnya dalam Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo dan peraturan yang mengatur pelaksanaan Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo.
2. Interpretasi, yaitu kejelasan dan kekonsistenan informasi yang disampaikan terkait Program JKN-KIS ini kepada penyandang disabilitas. Penyampaian informasi tersebut bisa saja saat sosialisasi atau pada saat memberikan pelayanan.
3. Aplikasi, yaitu terkait prosedur pendaftaran Program JKN-KIS, jenis pelayanan kesehatan yang diberikan, dan fasilitas yang disediakan di setiap fasilitas kesehatan.

Sedangkan teori yang digunakan peneliti untuk melihat respon penyandang disabilitas yaitu teori respon menurut Mubyarto (1993) dalam Wibawa (1994). Dalam teori ini terdapat lima jenis respon, respon tersebut antara lain:

1. Skeptis, respon ini ditunjukkan dengan sikap ragu atau tidak percaya terhadap peraturan yang ada terkait implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo.
2. Kritis, respon ini ditunjukkan dengan sikap yang dapat menemukan solusi dari masalah atau kendala yang dihadapi berdasarkan informasi-informasi yang ada.
3. Analitis, respon ini ditunjukkan dengan mengetahui sebab-akibat dari peraturan atau masalah yang ada, sehingga dapat memberikan sumbangsan supaya pelaksanaannya lebih baik.
4. Reaktif konfrontatif, respon ini ditunjukkan dengan sikap tidak sepakat atau bertentangan atau apatis dengan kebijakan yang ada, sikap ini dapat diwujudkan dalam mobilisasi masa atau gerakan otoriter.
5. Adaptif kompromistis, respon ini ditunjukkan dengan sikap yang cenderung menyesuaikan diri terhadap peraturan yang ada dan tidak melakukan tuntutan (pro, kontra, netral).

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui respon penyandang disabilitas tentang implementasi

Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Peneliti menggunakan cara *snowball* untuk menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki JKN KIS PBI. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) yang mana ada tiga alur kegiatan yang bersifat interaktif dan terus menerus hingga data menjadi jenuh dalam menganalisis data, tiga alur tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini akan membahas terkait dengan respon penyandang disabilitas dalam Implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan teori respon menurut Mubyarto (1993) dalam Wibawa (1994). Adanya implementasi Program JKN KIS ini diharapkan muncul respon dari kelompok sasaran terhadap program tersebut. Respon kelompok sasaran dalam hal ini yaitu penyandang disabilitas Kabupaten Sukoharjo terhadap dampak kebijakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah implementasi Program JKN KIS, menjadi penting karena dari respon tersebut dapat untuk mengukur hasil kinerja dari program tersebut yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi implementasi dari program itu sendiri. Kemudian berikut ini adalah respon penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan implementasi Program JKN KIS:

A. Organisasi

a. Lembaga

Penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo mayoritas tidak mengetahui secara rinci organisasi pelaksana program tersebut. Mereka hanya mengetahui bahwa pelaksananya adalah pemerintah secara umum, dinas sosial, puskesmas dan rumah sakit. Akan tetapi, ketika peneliti menjelaskan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, mereka akhirnya dapat memahami dan mengetahui secara rinci bahwa organisasi pelaksana Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan dengan BPJS. Implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh empat organisasi yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya organisasi-organisasi tersebut Program JKN KIS sudah dapat terlaksana sampai saat ini. Akan tetapi respon yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas terkait dengan keempat organisasi pelaksana yang

ada ini tidak semua sama. Mayoritas penyandang disabilitas menilai bahwa organisasi pelaksana Program JKN KIS yang ada saat ini sudah cukup dan tidak diperlukan organisasi lain lagi untuk membantu melaksanakan program tersebut. Respon tersebut masuk ke dalam respon adaptif kompromistis. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas bersikap cenderung menyesuaikan diri dan tidak melakukan tuntutan terhadap organisasi pelaksana yang sudah ada saat ini. Selain itu, mereka juga merasa terbantu dengan adanya sanggar inklusi. Sanggar inklusi memang bukan lembaga resmi dalam pelaksanaan Program JKN KIS, namun adanya sanggar ini membantu menyalurkan informasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas terkait dengan Program JKN KIS.

Selain respon adaptif kompromistis, ada respon lain yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas terkait dengan organisasi pelaksana Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Beberapa penyandang disabilitas menilai bahwa organisasi yang ada saat ini sudah cukup, akan tetapi masih terdapat masalah yakni masih ada penyandang disabilitas yang belum mendapatkan JKN KIS dan juga ada yang belum mengetahui fungsi dari kartu KIS tersebut. Sehingga secara tidak langsung mereka menilai masih ada masalah atau kekurangan dalam lembaga pelaksana Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Mereka memberikan saran kepada organisasi pelaksana atas masalah yang ada agar segera memproses teman-teman penyandang disabilitas yang belum mendapat JKN KIS dan memberikan penjelasan agar dapat dipahami oleh penyandang disabilitas terkait dengan fungsi kartu KIS. Dengan adanya saran yang disampaikan, menunjukkan adanya respon analitis yang ditunjukkan oleh beberapa penyandang disabilitas terkait dalam hal organisasi pelaksana Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Hanya ada dua respon yang ditunjukkan dalam hal organisasi pelaksana Program JKN KIS ini, yaitu respon adaptif kompromistis dan respon analitis yang telah disampaikan di atas, dengan mayoritas penyandang disabilitas menunjukkan respon adaptif kompromistis. Sedangkan respon yang tidak muncul dalam penelitian ini adalah respon skeptis, kritis, dan reaktif konfrontatif. Respon skeptis tidak ditunjukkan dalam hal organisasi pelaksana Program JKN KIS karena tanggapan penyandang disabilitas yang menyatakan yakin pada organisasi pelaksana ini menandakan bahwa tidak ada keraguan atau rasa tidak percaya yang mana menunjukkan tidak adanya respon skeptis dalam hal lembaga pelaksana Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo, karena respon skeptis ditunjukkan dengan sikap ragu atau rasa tidak percaya. Dalam hal lembaga ini juga tidak ditemukan respon kritis yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan respon kritis berarti dapat

menemukan solusi dari kendala atau masalah dengan berdasarkan informasi yang ada. Sedangkan penyandang disabilitas yang menemukan masalah dalam hal lembaga ini hanya bisa memberikan sumbang saran kepada organisasi pelaksana yang mana hal tersebut masuk dalam respon analitis. Kemudian untuk jenis respon reaktif konfrontatif juga tidak ditemukan dalam hal organisasi ini. Karena respon tersebut muncul ketika penerima program menunjukkan sikap tidak sepakat atau bertentangan dengan peraturan yang ada, sedangkan respon adaptif kompromistis berupa respon sikap yang pro atau setuju dan menyesuaikan diri dengan peraturan serta keadaan yang ada telah ditunjukkan oleh penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo dalam hal lembaga ini. Sehingga respon reaktif konfrontatif tidak muncul, karena jelas bertentangan dengan respon adaptif kompromistis yang telah ditunjukkan oleh penyandang disabilitas sejak awal.

b. Peraturan

Dalam pelaksanaan suatu program, pasti terdapat aturan yang mengikat dan menuntun agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Sama halnya dalam pelaksanaan Program JKN KIS PBI ini juga terdapat aturan dalam pelaksanaannya. Aturan tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, atau pun fasilitas kesehatan yang memberikan layanan. Dalam Pelaksanaan program JKN KIS, aturan tersebut pasti juga dirasakan oleh penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo, termasuk para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menilai bahwa peraturan yang ada terkait dengan Program JKN KIS, khususnya yang PBI, itu sudah cukup baik. Mereka juga menyatakan bahwa mereka menurut dan patuh dengan aturan yang sudah ada. Respon yang dinyatakan tersebut masuk dalam respon adaptif kompromitis, hal ini dikarenakan penyandang disabilitas menunjukkan sikap setuju dan menaati peraturan yang ada serta cenderung menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Mereka juga tidak melakukan tuntutan terhadap aturan yang ada. Sehingga penyandang disabilitas memiliki respon adaptif kompromistis terhadap peraturan pelaksanaan Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Semua penyandang disabilitas dalam penelitian ini menunjukkan respon adaptif kompromistis dan tidak ditemukan respon lain dalam hal peraturan ini.

Seluruh penyandang disabilitas yakin dan percaya terhadap aturan tersebut, tidak ada keraguan atau rasa tidak percaya yang ditunjukkan. Maka dari itu, respon skeptis tidak ada dalam hal aturan pelaksanaan Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Sikap yakin yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas ini mendukung respon adaptif kompromistis

yang jelas mereka tunjukkan sebelumnya terkait dengan aturan yang sudah ada dalam pelaksanaan Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Sama halnya dengan respon kritis, berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya respon tersebut dalam hal peraturan pelaksanaan Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Respon kritis berarti dapat menemukan solusi dari kendala atau masalah dengan berdasarkan informasi yang ada. Respon tersebut tidak ditemukan karena hasil wawancara menyatakan bahwa penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS tidak menemukan masalah atau pun kendala dalam hal peraturan maupun penerapan peraturan itu sendiri.

Respon analitis juga tidak ditemukan dalam hal peraturan ini, hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas menilai bahwa aturan yang sudah ada sudah bagus, sehingga mereka tidak memiliki saran untuk disampaikan kepada organisasi pelaksana Program JKN KIS. Respon analitis berarti mengetahui hubungan sebab-akibat dari peraturan dan masalah yang ada sehingga dapat memberi sumbang saran agar pelaksanaannya menjadi lebih baik. Sebelumnya penyandang disabilitas juga sudah menyatakan jika mereka tidak menemukan masalah atau kendala dalam penerapan peraturan pelaksana Program JKN KIS oleh organisasi pelaksana. Kemudian untuk jenis respon reaktif konfrontatif juga tidak ditemukan dalam aspek organisasi ini. Respon tersebut muncul ketika tidak sepakat atau bertentangan dengan peraturan yang ada, sedangkan respon adaptif kompromistis berupa respon sikap yang pro atau setuju dan menyesuaikan diri terhadap peraturan yang ada telah ditunjukkan oleh penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo dalam hal peraturan pelaksanaan Program JKN KIS. Sehingga respon reaktif konfrontatif tidak muncul, karena jelas bertentangan dengan respon adaptif kompromistis yang telah ditunjukkan oleh penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan peraturan pelaksanaan program tersebut.

B. Interpretasi

Interpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejelasan dan konsistensi informasi terkait JKN KIS yang disampaikan oleh implementor kepada kelompok sasaran yakni penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. Kejelasan dan konsistensi informasi yang yang dimaksud bisa saja saat adanya sosialisasi atau pada saat para implementor memberikan pelayanan ketika ada pertanyaan, keluhan, atau lainnya. Adanya kejelasan dan konsistensi informasi ini bertujuan agar tidak ada *miss interpretation*, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara implementor dengan penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Respon penyandang disabilitas

terkait aspek interpretasi dalam implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo ini beragam, ada yang menunjukkan respon adaptif kompromistis, analitis, dan kritis. Namun, mayoritas penyandang disabilitas memiliki respon yang adaptif kompromistis. Terkait dengan kejelasan dan kekonsistenan informasi yang disampaikan oleh organisasi pelaksana Program JKN KIS ketika menyampaikan informasi, mereka menilai informasi yang disampaikan sudah jelas dan konsisten sehingga bisa dipahami. Sikap positif ini masuk dalam respon adaptif kompromistis, karena penyandang disabilitas tidak melakukan tuntutan terhadap penyampaian informasi oleh organisasi pelaksana Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Selain respon adaptif kompromistis, respon analitis juga ditunjukkan oleh beberapa penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan mereka menilai masih ada kekurangan atau kendala dalam penyampaian informasi oleh organisasi pelaksana Program JKN KIS. Kendala tersebut adalah informasi yang disampaikan oleh organisasi pelaksana tidak bisa ditangkap dengan baik oleh penyandang disabilitas khususnya oleh tuna rungu dan wicara. Hal tersebut dikarenakan pada saat penyampaian informasi, tidak ada penerjemah atau juru bahasa isyarat yang bisa menyampaikan informasi kepada tuna rungu dan wicara. Kemudian mereka memberikan saran kepada organisasi pelaksana untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan ke penyandang disabilitas untuk menyampaikan informasi terkait dengan JKN KIS, karena jika informasi hanya disampaikan melalui media sosial, masih banyak yang belum bisa mengaksesnya, sehingga perlu diadakan sosialisasi secara langsung. Kemudian ketika menyampaikan informasi lebih baik jika ada penerjemah bahasa isyarat agar penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dan wicara dapat menangkap informasi dengan baik. Sikap yang ditunjukkan oleh kelima penyandang disabilitas ini masuk dalam respon analitis, mereka menemukan suatu masalah kemudian memberikan sumbang saran kepada organisasi pelaksana Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo agar pelaksanaan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian selain respon adaptif kompromistis dan respon analitis, salah satu penyandang disabilitas menunjukkan respon kritis. Ia menemukan masalah dalam hal penyampaian informasi yaitu ada penyandang disabilitas lain yang belum mendaftar JKN KIS karena tidak mendapatkan informasi terkait hal itu, kemudian AP menyampaikan informasi-informasi yang ia ketahui guna membantu permasalahan penyandang disabilitas yang lain. Sikap tersebut masuk dalam respon kritis, yang mana ditunjukkan dengan penemuan solusi dari masalah yang dihadapi berdasarkan informasi-informasi yang ada.

Respon yang tidak ditunjukkan oleh penyandang disabilitas dalam hal kejelasan dan kekonsistenan informasi yang disampaikan oleh organisasi pelaksana Program JKN KIS ini adalah respon skeptis dan respon kritis. Respon

skeptis tidak ditunjukkan dalam hal ini karena semua penyandang disabilitas menyatakan keyakinan yang menandakan bahwa tidak ada keraguan atau rasa tidak percaya. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya respon skeptis dalam aspek interpretasi pelaksanaan Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Respon yang juga tidak ditemukan dalam aspek ini adalah respon reaktif konfrontatif. Respon reaktif konfrontatif tidak muncul dikarenakan respon adaptif kompromistis berupa sikap pro dan diikuti sikap menyesuaikan diri dengan informasi yang ada telah ditunjukkan oleh mayoritas penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga respon reaktif konfrontatif yang menunjukkan sikap tidak sepatutnya atau bertentangan dalam implementasi Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo terkait aspek interpretasi tidak ditemukan.

C. Aplikasi

a. Pendaftaran Program JKN KIS

Penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan JKN KIS secara langsung dari pemerintah, mereka dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan JKN KIS. Namun berdasarkan hasil wawancara, mayoritas penyandang disabilitas mendapatkan JKN KIS langsung dari pemerintah dan ada juga yang pendaftarannya dibantu oleh pemerintah desa setempat. Respon penyandang disabilitas dalam hal pendaftaran Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo mayoritas adalah adaptif kompromistis. Mereka menunjukkan sikap menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur yang ada tanpa melakukan tuntutan. Mereka juga menilai pendaftaran Program JKN KIS ini sudah baik dan mudah. Hal tersebut menunjukkan respon adaptif kompromistis terkait pendaftaran Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan mereka bersikap menyesuaikan diri dengan menaati aturan yang ada dan tidak melakukan tuntutan dalam hal prosedur pendaftaran Program JKN KIS. Selain respon adaptif kompromistis, respon lain juga ditunjukkan oleh dua penyandang disabilitas terkait pendaftaran Program JKN KIS. Mereka menemukan masalah dalam pendaftaran Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo, yakni masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan JKN KIS. Kemudian mereka memberikan saran kepada organisasi pelaksana agar mengadakan kampanye terkait dengan cara mendaftar JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo, hal ini perlu dilakukan karena masih banyak penyandang disabilitas yang tidak tau cara mendaftar JKN KIS. Selain itu mereka juga menyarankan agar pembagian JKN KIS tepat sasaran, sehingga dapat digunakan oleh orang yang lebih membutuhkan. Respon tersebut menunjukkan bahwa kedua penyandang disabilitas tersebut memiliki respon analitis terkait pendaftaran Program JKN KIS. Tidak hanya respon

adaptif kompromistis dan analitis saja, respon kritis juga ditunjukkan oleh seorang penyandang disabilitas. Ia mengalami kendala pada saat akan mendaftar JKN KIS, namun masalah tersebut bisa diselesaikan karena ada sanggar, ada informasi yang disampaikan dari sanggar yang dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Sikap ini masuk dalam respon kritis, hal tersebut dikarenakan ia dapat menemukan solusi dari masalah yang dialaminya dengan menggunakan informasi yang ada.

Dalam hal pendaftaran Program JKN KIS ini, respon yang tidak muncul adalah respon skeptis dan reaktif konfrontatif. Berdasarkan seluruh hasil wawancara terkait dengan keyakinan penyandang disabilitas terhadap prosedur pendafatara, respon skeptis tidak ditunjukkan oleh penyandang disabilitas. Hal ini karena seluruh penyandang disabilitas menunjukkan sikap yakin atau percaya dengan prosedur pendaftaran Program JKN KIS, tidak ada keraguan atau rasa tidak percaya yang ditunjukkan. Respon yang juga tidak muncul dalam hal pendaftaran selain respon skeptis adalah respon reaktif konfrontatif. Respon ini bertentangan dengan respon adaptif kompromistis yang cenderung menyeruaikan diri dengan aturan yang ada dan tidak melakukan tuntutan. Sedangkan respon reaktif konfrontatif ditunjukkan dengan sikap yang bertentang dengan aturan yang ada dan rasa tidak sepakat. Karena jelas bertentangan, maka respon reaktif konfrontatif tidak muncul karena mayoritas penyandang disabilitas telah menunjukkan respon adaptif kompromistis dalam hal pendaftaran Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo.

b. Jenis Pelayanan Kesehatan

Jenis pelayanan kesehatan adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas, klinik, atau pun rumah sakit. Penyandang disabilitas menunjukkan respon adaptif kompromistis dalam hal jenis pelayanan kesehatan. Mereka menilai bahwa jenis pelayanan yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, baik itu di fasilitas tingkat pertama maupun di tingkat lanjut. Sikap positif yang ditunjukkan ini masuk dalam respon adaptif kompromistis, yang mana penyandang disabilitas tidak melakukan tuntutan dan menyesuaikan diri dengan jenis pelayanan yang diberikan. Tidak ada respon lain yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas dalam hal jenis layanan kesehatan.

Seluruh penyandang disabilitas yakin dengan jenis pelayanan yang diberikan. Tidak ada rasa ragu atau tidak percaya yang merupakan perwujudan dari respon skeptis. Sehingga tidak ditemukan respon skeptis dalam hal jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dalam Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Terkait kendala atau masalah pada saat

pemberian layanan kesehatan, penyandang disabilitas tidak menemukan atau mengalami masalah. Ada yang mengalami kendala namun tidak berasal dari organisasi pelaksana Program JKN KIS, melainkan berasal dari dirinya sendiri. Sehingga respon kritis tidak ditemukan terkait dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas tidak menemukan masalah, sehingga tidak ada masalah atau kendala yang perlu diselesaikan oleh penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo. Respon analitis juga tidak ditemukan dalam hal jenis pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan tidak ada kendala atau masalah yang ditemukan oleh penyandang disabilitas pada saat pemberian layanan kesehatan. Karena tidak ditemukannya masalah maka penyandang disabilitas tidak bisa memberikan saran untuk jenis pelayanan kesehatan, pemberian saran ini masuk ke dalam respon analitis. Respon reaktif konfrontatif juga tidak ditemukan dalam hal jenis pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan telah ditunjukkan respon adaptif kompromistis oleh penyandang disabilitas. Mereka bersikap menyesuaikan diri dan tidak melakukan tuntutan, sikap tersebut bertentangan dengan respon reaktif konfrontatif yang mana ditunjukkan dengan sikap tidak sepakat dengan aturan yang ada. Sehingga respon reaktif konfrontatif tidak ditemukan dalam hal jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dalam Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo.

c. Fasilitas, Sarana, dan Prasarana

Fasilitas, sarana, dan prasarana digunakan untuk menunjang pemberian layanan kesehatan kepada pasien, baik yang disediakan di FKTP maupun di FKTL. Mayoritas penyandang disabilitas memiliki respon adaptif kompromistis dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan, mereka tidak melakukan tuntutan dan bersikap menyesuaikan diri. Penyandang disabilitas menilai bahwa fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit sudah bagus dan cukup lengkap. Sikap yang ditunjukkan ini masuk ke dalam respon adaptif kompromistis. Selain itu ada satu penyandang disabilitas yang memiliki respon analitis terkait dengan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diberikan. ia menilai bahwa sebenarnya fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan sudah cukup baik. Namun, ditemui kendala saat akan menggunakan fasilitas tersebut malah digunakan oleh masyarakat non disabilitas. Kemudian ia memberikan berbagai saran agar masyarakat non disabilitas bisa memahami bahwa fasilitas yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas hanya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas saja. Sikap ini masuk dalam respon analitis, karena ia menemukan masalah dan kemudian memberikan saran agar pelaksanaan

kedepannya lebih baik lagi. Selain respon adaptif kompromistis dan analitis, tidak ditemukan respon lain dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan di setiap fasilitas kesehatan.

Respon skeptis tidak muncul dalam hal ini karena penyandang disabilitas merasa yakin dengan fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan di fasilitas kesehatan, baik itu yang disediakan di FKTP maupun FKTL. Tidak ada rasa ragu atau tidak percaya yang ditunjukkan yang merupakan perwujudan sikap dari respon skeptis. Kemudian respon kritis juga tidak muncul terkait hal tersebut. Respon kritis tidak muncul dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan di fasilitas kesehatan dikarenakan tidak ada masalah atau kendala yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika akan mengakses atau menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada. Hanya ada satu penyandang disabilitas yang menemukan masalah namun ia hanya memberikan saran untuk masalah tersebut, hal ini masuk dalam respon analitis. Sehingga tidak ada respon kritis yang mana ditunjukkan dengan sikap menemukan solusi dari suatu masalah dengan informasi yang ada. Respon reaktif konfrontatif juga tidak muncul, respon tersebut muncul ketika menunjukkan sikap tidak sepakat atau bertentangan dengan peraturan yang ada, sedangkan respon adaptif kompromistis berupa respon sikap yang pro atau setuju dan menyesuaikan diri terhadap peraturan yang ada telah ditunjukkan oleh penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana ini. Sehingga respon reaktif konfrontatif tidak muncul, karena jelas bertentangan dengan respon adaptif kompromistis yang telah ditunjukkan oleh penyandang disabilitas penerima Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo terkait dengan fasilitas, sarana, prasarana yang disediakan di fasilitas kesehatan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas respon yang ditunjukkan oleh penyandang disabilitas adalah adaptif kompromistis, sedangkan respon yang tidak pernah muncul adalah respon reaktif konfrontatif. Berikut adalah ringkasan respon dari masing-masing aspek:

1. Organisasi

a. Lembaga

Respon penyandang disabilitas dalam hal lembaga pelaksana program JKN KIS ini mayoritas cenderung adaptif kompromistis, yakni menunjukkan sikap yang cenderung menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak melakukan tuntutan. Mereka menilai bahwa organisasi yang ada sudah cukup

dan sudah baik dalam memnjalankan tugasnya. Namun juga ditemukan tiga penyandang disabilitas yang memiliki respon analitis, yakni dengan memberikan saran kepada pihak terkait atas masalah yang ada agar pelaksanaannya dapat lebih baik lagi kedepannya. Mereka menilai bahwa ada orang yang dirasa mampu namun malah mendapat JKN KIS sedangkan masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan JKN KIS dan masih ada penyandang disabilitas yang belum tau fungsi dari JKN KIS tersebut, sehingga mereka menyankan untuk memberikan penjelasan fungsi dari kartu tersebut pada penyandang disabilitas dan mereka juga menyarankan agar penyandang disabilitas yang belum mendapatkan JKN KIS bisa segera diproses. Dalam hal lembaga ini penyandang disabilitas tidak menunjukkan respon skeptis, kritis, dan reaktif konfrontatif.

b. Peraturan

Respon penyandang disabilitas terkait dengan peraturan yang mengatur pelaksanaan JKN KIS, baik itu aturan dari pemerintah maupun rumah sakit, mereka cenderung memiliki respon adaptif kompromistis. Respon ini ditunjukkan dengan sikap penyandang disabilitas yang cenderung menyesuaikan diri dengan peraturan yang sudah ada dan tidak melakukan tuntutan. Mereka juga menilai aturan yang diterapkan sudah cukup baik, mereka juga percaya dengan aturan-aturan yang ada. Penyandang disabilitas juga tidak menemukan kendala atau masalah saat penerapan aturan tersebut dan mereka tidak memiliki saran karena dirasa peraturan yang ada sudah cukup bagus. Sehingga hanya respon adaptif kompromistis saja yang ditunjukkan dalam hal peraturan ini, penyandang disabilitas tidak menunjukkan adanya respon skeptis, kritis, analitis, maupun reaktif konfrotatif.

2. Interpretasi

Enam dari 15 penyandang disabilitas menunjukkan respon adaptif kompromistis dalam aspek interpretasi, mayoritas mereka menilai bahwa penyampaian informasi terkait dengan Program JKN KIS sudah jelas dan konsisten sehingga dapat dipahami dengan baik oleh penyandang disabilitas. Mereka percaya dengan informasi yang disampaikan dan tidak ada masalah saat menjalin komunikasi. Mereka juga tidak melakukan tuntutan dalam hal penyampaian informasi. Namun ada lima penyandang disabilitas yang memiliki respon analitis, mereka menyarankan kepada organisasi pelaksana agar mengadakan sosialisasi secara langsung, karena masih banyak penyandang disabilitas yang buta huruf dan tidak bisa mengakses internet untuk mencari informasi terkait Program JKN KIS. Selain itu, mereka juga menyarankan agar ada penerjemah bahasa isyarat ketika memberikan informasi, hal ini agar memudahkan penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu dan tuna wicara,

dalam berkomunikasi dan menangkap isi dari informasi yang disampaikan. Selain itu, ada satu penyandang disabilitas yang memiliki respon kritis, respon ini ditunjukkan dengan penyelesaian masalah berdasarkan informasi-informasi yang didapat. Ia menjelaskan informasi-informasi terkait dengan Program JKN KIS kepada teman-teman difabel yang tidak mendapatkan informasi dan belum mendapatkan JKN KIS, ia menyampaikan informasi tersebut agar teman-teman difabel yang belum mempunyai JKN KIS bisa segera mendaftarkan diri mereka. Respon yang tidak muncul dalam aspek initerpretasi ini adalah respon skeptis dan reaktif konfrontatif.

3. Aplikasi

a. Pendaftaran Program JKN KIS

Respon penyandang disabilitas dalam hal pendaftaran Program JKN KIS mayoritas adalah adaptif kompromistis, yaitu menunjukkan sikap menyesuaikan diri dan tidak melakukan tuntutan. Hal tersebut karena mayoritas penyandang disabilitas mendapatkan JKN KIS langsung dari pemerintah tanpa perlu mendaftarkan diri dan mengurus berkas. Namun ada juga mereka yang mendaftar secara mandiri tanpa bantuan pemerintah menilai bahwa prosedur pendaftaran sudah bagus, tidak ribet seperti yang banyak orang katakan, sekali mengurus bisa langsung jadi dan tidak merepotkan. Pada saat pendaftaran mereka juga tidak menemui kendala atau masalah, sehingga mereka menilai pendaftaran JKN KIS sudah cukup baik. Akan tetapi ada dua penyandang disabilitas yang memiliki respon analitis dalam prosedur pendaftaran JKN KIS. Respon ini ditunjukkan dengan memberikan saran kepada organisasi pelaksana terkait dengan pendaftaran Program JKN KIS agar kedepannya menjadi lebih baik. Mereka menyarankan agar diadakan kampanye atau pemberitahuan secara luas tentang cara pendaftaran Program JKN KIS karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum tahu. Kemudian mereka juga menyarankan agar pembagian JKN KIS itu merata dan tidak salah sasaran. Selain itu ada satu orang penyandang disabilitas yang memiliki respon kritis dalam pendaftaran Program JKN KIS. Respon ini ditunjukkan dengan penemuan solusi dari suatu masalah berdasarkan dari informasi yang ada. Masalah yang dihadapi adalah dulu ketika pendafaran JKN KIS susah dan tidak ada yang membantu, tetapi sekarang dengan adanya sanggar inklusi, pendaftaran menjadi lebih mudah karena mendapat banyak informasi dari sanggar terkait dengan cara pendaftaran Program JKN KIS, sehingga dapat mengatasi masalah yang ada. Respon skeptis dan reaktif konfrontatif tidak ditunjukkan oleh penyandang disabilitas dalam hal pendaftaran Program JKN KIS di Kabupaten Sukoharjo.

b. Jenis Pelayanan Kesehatan

Respon penyandang disabilitas tentang jenis pelayanan kesehatan yang diberikan adalah adaptif kompromistis, mereka tidak melakukan tuntutan pada jenis pelayanan yang diberikan. Mereka menilai bahwa jenis pelayanan yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, mereka juga percaya dengan jenis layanan kesehatan yang diberikan. Sikap pemberi layanan juga dinilai sudah baik, ramah, dan sabar. Tidak ditemukan respon lain selain adaptif kompromitis. Respon skeptis, kritis, analitis, dan reaktif konfrontatif tidak ditunjukkan oleh penyandang disabilitas dalam hal jenis pelayanan kesehatan.

c. Fasilitas, Sarana, dan Prasarana

Mayoritas respon penyandang disabilitas dalam hal fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan di setiap fasilitas kesehatan yakni adaptif kompromistis, mereka bersikap menyesuaikan diri dan tidak melakukan tuntutan. Mereka menilai bahwa fasilitas, sarana, dan prasarana yang disediakan sudah cukup lengkap, bagus, dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik itu yang berada di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Mereka tidak menemui masalah atau kendala saat mengakses fasilitas, sarana, dan prasarana yang ada. Namun ada satu penyandang disabilitas yang memiliki respon analitis. Ia menemukan kendala yakni fasilitas yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas malah digunakan oleh masyarakat non disabilitas. Kemudian ia memberikan saran agar aturan penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana diperketat lagi sehingga jika fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi penyandang disabilitas maka orang normal tidak boleh menggunakannya, bila perlu diberikan semacam tulisan agar orang lain paham fasilitas tersebut dipergunakan untuk apa dan untuk siapa, dan diharapkan orang lain bisa saling memahami dan menghargai.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran khususnya kepada organisasi pelaksana Program JKN KIS di KABUPATEN Sukoharjo sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo hendaknya melakukan perluasan pendataan terhadap penyandang disabilitas agar semua dapat terdata dan mendapatkan JKN KIS secara merata, tidak hanya mengandalkan data dari DTKS saja yang belum sepenuhnya semua penyandang disabilitas terdata di DTKS.
2. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dapat memberikan kontak yang dapat dihubungi agar ketika ada masyarakat yang menemukan penyandang disabilitas belum mendapatkan JKN KIS dapat menghubungi kontak tersebut agar dapat segera didata dan diproses.
3. Semua implementor Program JKN KIS, utamanya fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKTL, hendaknya memiliki staf yang menguasai bahasa

isyarat agar mempermudah komunikasi antara penyandang disabilitas, khususnya tuna rungu dan tuna wicara, dengan pihak fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

4. Fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKTL, baiknya memprioritaskan penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Referensi

- Adriyansyah dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(1), 13-22.
- Cahyono, S A T. (2017). Penyandang Disabilitas: Menelisik Layanan Rehabilitasi Sosial Difabel pada Keluarga Miskin. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), hal 239-254.
- Nugraheni, Wahyu dkk. (2019). *Peran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mengurangi Beban Keuangan pada Perawatan Persalinan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Badan Litbangkes.
- Permatasari, Iman A. (2020). Book Review: Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), hal 34-38.
- Ponto, Auldrin M., dkk. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 3(XX), 36-52.
- Putri, P M & Murdi P B. (2019). Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1), hal 80-97.
- Ramdhani, Abdullah & Muhammad Ali Ramdhani. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Sumantri, Arga. (2017). *Program JKN Dinilai Belum Perhatikan Anak Penyandang Disabilitas*. Diakses pada 6 April 2021, jam 11.25 WIB dari: <https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/VNx3fAaK-program-jkn-dinilai-belum-perhatikan-anak-penyandang-disabilitas>
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuliana, Yesi. (2019). Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas Pengguna Jasa Angkutan Udara. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(3), hal 536-547.